

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP-3) DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN EKONOMI WILAYAH
(Studi Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta)**

Deni Ramdani

Anggota forum Purna PSP3-Kota Bandung

Email: ibenk.ramdani@gmail.com

ABSTRACT

The execution of PSP3's program was realized correctly that was touching assorted of activity component in the public that was economics, education and social. The activity of program had the character of flexible accomodating with need there in the public. The execution of program PSP3 in the region of Dlingo District faced various constraints like geographical condition, language factor and cultural, lack of a reliable source of support from local local government, financing element of management of program. Programme PSP3 in the Dlingo district was not able yet to increased economic resilience in the region, because was not able yet to increased entrepreneurship independence in Dlingo District.

Keywords: *PSP3 Program, Entrepreneurial Self-Reliance, Economic Resilience of Region.*

ABSTRAK

Pelaksanaan program PSP3 direalisasikan dengan tepat yaitu menyentuh berbagai macam komponen kegiatan di masyarakat yaitu perekonomian, pendidikan dan sosial. Kegiatan program bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan program PSP3 di wilayah Kecamatan Dlingo menghadapi berbagai kendala seperti kondisi geografis, faktor bahasa dan budaya, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat, unsur pendanaan dari pengelola program. Program PSP3 di wilayah Kecamatan Dlingo belum dapat meningkatkan ketahanan ekonomi di wilayah tersebut, karena belum dapat meningkatkan kemandirian kewirausahaan di Kecamatan Dlingo.

Kata Kunci: *Program PSP3, Kemandirian Wirausaha, Ketahanan Ekonomi Wilayah*

PENGANTAR

Keberhasilan pembangunan kepemudaan terutama dalam menciptakan sumber dayam manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing menjadi salah satu kunci dalam membuka peluang dan

kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan masa depan Indonesia sebagai Negara Bangsa (*Nation State*).

Selain itu jiwa kepeloporan kepemudaan dalam kaitannya dengan perkembangan dan kesuksesan pembangunan

dapat mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kepeloporan kepemudaan. Salah satu program pemerintahan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ada kaitannya dengan jiwa kepemudaan dan kepeloporan adalah program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) (UU No.40, 2009).

Program ini sudah berlangsung sejak tahun 1989, pada tahun 2011 Kemenpora melakukan revitalisasi program SP-3 menjadi PSP-3 (Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan). Penempatan kata Pemuda memiliki maksud sebagai simbol dari perwujudan lingkup tugas dan fungsi kerja Kemenpora, selain itu sarjana yang dilibatkan adalah kaum muda yang dicirikan dari usia, status pernikahan, jiwa dan maksud yang terakhir dari penempatan kata pemuda adalah fokus sasaran program ini memberdayakan penduduk terutama usia muda.

Sarjana yang sudah ditempatkan dari tahun 1989-2010 sebanyak 16.567 orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk angkatan pertama PSP-3 pada tahun 2011 sebanyak 1000 orang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia (Kemenpora, 2013).

Besarnya disparitas antara desa maju dengan desa tertinggal banyak disebabkan oleh: terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang profesional; belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif dan produktif; pendekatan *top down* dan *bottom up* yang belum berjalan seimbang; pembangunan belum sepenuhnya partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur; kebijakan yang sentralistik sementara kondisi pedesaan amat plural dan beragam; pembangunan pedesaan

belum terintegrasi dan belum komperhensif; fokus kegiatan pembangunan pedesaan; lokus kegiatan belum tepat sasaran; dan yang lebih penting kebijakan pembangunan desa selama ini belum sepenuhnya menekankan prinsip *pro poor, pro job dan pro growth*. (Republika, edisi Kamis 7 November 2013) Mengingat sudah lamanya program PSP3 ini Kemenpora menyadari bahwa keberadaan program ini belum terasa cukup signifikan dampaknya bila diukur dalam aspek pengurangan kemiskinan dan peningkatan aset masyarakat. Namun jika diukur dari aspek sosial keberadaan PSP-3 untuk bekerja di pedesaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang positif. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP-3) Dalam Meningkatkan Kemandirian Wirausaha Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah” (Studi Di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta).

PEMBAHASAN

Evaluasi Dampak Program

Secara konseptual, studi mengenai evaluasi dalam suatu pelaksanaan program dengan evaluasi dampak seringkali tumpang tindih karena evaluasi mengenai dampak jangka pendek merupakan bagian integral dari evaluasi implementasi/pelaksanaan suatu program. Namun studi dampak dapat diidentifikasi secara sempurna menurut acuan waktu sebagaimana dijelaskan pada rencana program atau setidaknya-tidaknya waktu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan (pengumpulan data atas dasar periode waktu tertentu) sehingga dampaknya dapat

dipelajari berdasarkan data yang mencukupi, artinya bahwa data-data yang diambil dapat menunjukkan adanya dampak dari program tersebut.

Kebanyakan ukuran-ukuran ekonomi digunakan untuk melihat keuntungan yang diperoleh secara individual. Sementara untuk melihat secara non individual digunakan secara agregasi dari jumlah individu yang memperoleh keuntungan secara ekonomis. Evaluasi dampak tersebut sering diasumsikan sebagai analisis harga, meskipun hal-hal yang dihargakan tidak hanya terbatas pada lingkup ekonomi tetapi juga sosial dan politis. Setidaknya terdapat empat tipe dampak program yang menjadi perhatian, yaitu: kesejahteraan ekonomi, proses pembuatan keputusan, sikap masyarakat dan kualitas hidup. Evaluasi dalam dampak ekonomi baik tingkat individu maupun sosial, terdapat beberapa konsep yang dapat dijadikan ukuran untuk membantu mencermati dampak tersebut, seperti; pendapatan, nilai tambah, rasio untung rugi, kelompok menengah atau munculnya kekuatan baru dan konsep-konsep sejenis (Ekowati, 2005). Dampak dari suatu program yang dilaksanakan merupakan hal yang penting bagi kualitas individu, kelompok dalam masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Ukuran-ukuran pada dampak ini sering merupakan ukuran-ukuran non ekonomi. Misalnya, terdapatnya perilaku ruang yang berbeda antar masing-masing kelompok dalam masyarakat, adanya perbedaan kesempatan dan peluang bagi kehidupan seseorang untuk memperkaya diri dan membelanjakan waktu luangnya, melek huruf, kesehatan dan kesempatan yang ada untuk memperoleh berbagai macam pendidikan merupakan dampak kualitas hidup yang harus dicermati

oleh analisis-kebijakan, (D'abreo, 1993).

Meskipun penelitian evaluasi dapat menggunakan berbagai model, di antaranya kausal dan deskriptif, tetapi dalam evaluasi dampak program, model yang digunakan selalu kausal, karena pemahaman mengenai dampak akan terkait dengan pengertian bahwa dampak adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu sebab (program). Penjelasan mengenai hubungan akibat ini mendorong digunakannya model kausal dalam praktek penelitian evaluasi dampak program. Dari sudut pandang empiris, hubungan sebab akibat membawa adanya tiga kondisi; pertama, perubahan pada program (variabel bebas) akan paralel (*covary*) dengan perubahan pada keluarannya/hasil (variabel tergantung); kedua, perubahan pada variabel bebas harus mendahului perubahan variabel tergantung; ketiga, peneliti harus mengesampingkan alternatif perubahan pada hasil.

PSP3 Sebagai Program Pengembangan Pemuda

Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan terutama di wilayah pedesaan melalui peran kepeloporan pemuda, dalam berbagai aktivitas kepemudaan yang secara langsung berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan pemuda desa. Keberadaan program yang sudah memasuki angkatan XXII ini terkait dengan tiga permasalahan utama yang berusaha dijawab oleh Kemempora yaitu Pemuda Berpendidikan, Pembangunan Pedesaan dan Pembangunan Sikap atau Perilaku Kebangsaan Pemuda. Selama ditempatkan di desa, peserta PSP3 akan melaksanakan tugasnya mengorganisir, menggerakkan dan mendampingi masyarakat dalam berbagai

aksi program di bidang keuangan mikro, kebangsaan dan teknologi informatika. Penilaian kerja peserta dilakukan secara insidental dan berkala oleh tim pusat dan daerah secara terpadu dengan proses pendampingan sesuai pedoman yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penempatan peserta berdasarkan zona tersebut akan terus dipantau untuk memastikan keberhasilan program PSP3 ini. Suryo (2013) dalam *Detik News* edisi Rabu, 04/09/2013 menyatakan, “indikator keberhasilan program dapat terlihat dengan 3 unsur yaitu adanya perubahan kapasitas PSP3, adanya hasil kegiatan di masyarakat dan adanya keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat”.

Pembangunan dan kemajuan desa merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa dan negara, namun sangat disayangkan pemuda-pemuda berusia produktif banyak yang lebih memilih berpindah ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri karena pandangan bahwa kota besar dapat memberi harapan kehidupan yang lebih baik. Persoalan ini menyebabkan desadesa kehilangan daya dukung ekonominya, pada akhirnya semakin banyak penduduk desa yang kesulitan lapangan pekerjaan sehingga memilih migrasi, menjadi tenaga kerja asing, atau malahan menjadi buruh di ladang pertaniannya sendiri. Oleh karena itu melalui program yang telah dirintis sejak 1989 ini, para pemuda sarjana yang telah berhasil menuntut ilmu di kotakota besar diajak untuk kembali ke desa dan menerapkan ilmu yang mereka miliki untuk memajukan pedesaan.

Ketahanan Ekonomi Wilayah

Menurut Sunardi (2004), ketahanan nasional sesungguhnya merupakan gambaran

atau model dari kondisi tata kehidupan nasional pada suatu saat tertentu. Sebagai gambaran suatu kondisi sudah tentu berubah menurut waktu, ataupun fungsi, oleh karena itu disebut dinamik. Tiap-tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional selalu berubah-ubah menurut waktu sehingga interaksinya yang kemudian menciptakan kondisi umum amat sulit dipantau karena sangat kompleks ketahanan ekonomi wilayah merupakan turunan dari teori ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi suatu wilayah dapat dikatakan kuat dan mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta menjamin kelangsungan perekonomian wilayah apabila masyarakatnya sejahtera, karena tingkat kesejahteraan mencerminkan kemajuan perekonomian wilayah.

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh setiap negara. Walaupun istilah ketahanan nasional itu dapat dikatakan sebagai istilah khas Indonesia, namun setiap negara harus memperhatikan unsur yang satu ini. Ketahanan nasional itu sendiri memiliki arti sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

Pelaksanaan Program PSP3

Pelaksanaan program PSP3 di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dimulai pada bulan Oktober 2011-September 2013. Sebelum penerjunan ke lapangan/ desa penempatan

para peserta PSP3 mendapatkan pelatihan dari LPPM UGM selama satu minggu. Hal ini dilakukan mengingat para peserta PSP3 mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang beraneka ragam dan berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki perbedaan baik dari segi bahasa daerah ataupun kultur dan kebudayaan yang berbeda pula. Program PSP3 pada awalnya memang difokuskan untuk benar-benar menyentuh persoalan-persoalan yang ada di masyarakat secara langsung terutama di tingkat masyarakat pemuda yang tentunya menjadi prioritas pengembangan, namun demikian dalam pelaksanaannya memang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Program PSP3 pada awalnya difokuskan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat pedesaan terutama yang berusia muda di lokasi di mana mereka ditempatkan. Pelaksanaannya di lapangan para peserta PSP3 tidak berpatokan hanya pada sektor perekonomian saja, tetapi banyak di antara mereka yang melakukan pemberdayaan di bidang sosial, pendidikan dan pembenahan administrasi pedesaan.

Sebenarnya sudah ada semacam tuntutan dari pengelola program yaitu Kemenpora bahwa hal yang utama atau diprioritaskan untuk dikembangkan adalah pada bidang pengembangan perekonomian atau kewirausahaan pemuda, walaupun pada kenyataannya pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih luas menyentuh berbagai macam sektor. Hal tersebut terjadi karena memang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para peserta PSP3 itu sendiri. Karena memang para peserta PSP3 ini berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda dan terkadang memang

tidak pas dengan sektor yang akan dikembangkan oleh peserta PSP3 tersebut. Oleh karena itu memang diperlukan kreatifitas yang tinggi untuk dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada di lapangan supaya tujuan pemberdayaan yang diinginkan dapat tercapai.

Kendala Yang Dihadapi

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program PSP3, yaitu:

Pertama, faktor kondisi geografis. Kondisi topografi Kabupaten Bantul sebagian besar wilayahnya termasuk dataran dengan kemiringan 0 - 2% seluas 31.421 Ha (61,99%). Selanjutnya wilayah dengan lereng curam (25 - 40%) dan sangat curam (>40%) seluas 4.264 Ha (8,41%) dan 4.009 Ha (7,90%). Sebaran dataran tersebut berada di bagian tengah memanjang dari pantai selatan ke utara yang meliputi Kecamatan Sanden, Kretek, Srandakan, Pundong, Pandak, Bantul, sebagian Imogiri, Jetis, sebagian Pleret, Sewon, Kasihan, Banguntapan, sebagian Piyungan dan sebagian Kecamatan Sedayu. Sebaran lereng curam dan sangat curam berada di bagian timur Kabupaten Bantul, khususnya di sebagian kecil Kecamatan Kretek, Pundong, Pleret dan Piyungan, sebagian besar Kecamatan Imogiri dan Dlingo

Kondisi geografis Kecamatan Dlingo berdasarkan data di bagian sebelumnya dengan kondisi berbukit-bukit serta mempunyai lahan yang luas antar perkampungan dan pedesaannya pun relatif mempunyai jarak yang lebih jauh juga menjadi kendala bagi para peserta PSP3. Karena pada awal penerjunan mereka ke lapangan kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya alat transportasi. Masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo sudah terbiasa menggunakan sepeda motor. Sedangkan para peserta PSP3

tidak mempunyai alat transportasi apapun. Kondisi infrastruktur atau jalan memang sudah relatif baik dengan sudah diaspalnya jalan-jalan hingga ke tingkat pedukuhan. Namun dengan ketiadaan alat transportasi maka hal tersebut seakan sia-sia. Fasilitas transportasi umumnya yang tersedia hanya ojek motor yang mempunyai tarif cukup mahal.

Kedua, faktor bahasa dan budaya. Faktor selanjutnya yang menjadi kendala adalah faktor bahasa dan budaya. Begitupun yang terjadi dengan para peserta PSP3 di Kecamatan Dlingo yang notabene berasal dari berbagai daerah dan tentunya mempunyai kendala dari segi bahasa ataupun kebudayaan yang berbeda. Pada awalnya memang sempat mendapatkan kesulitan dalam proses sosialisasi. Hal itu dikarenakan wilayah Kecamatan Dlingo yang termasuk wilayah terpencil sehingga tidak sedikit yang memang kaku atau mungkin sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, dalam hal ini peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sekitar sangatlah diperlukan dalam menjembatani kendala bahasa dan budaya tersebut.

Peserta PSP3 yang ada di Kecamatan Dlingo terdiri dari 16 orang yang semuanya berasal dari daerah yang berbeda-beda, yaitu dari Jawa Barat sebanyak 4 orang, dari Jawa Tengah 2 orang, dari Jawa Timur 3 orang, dari Kalimantan Barat 3 orang, dari Banten 3 orang dan dari Jakarta 1 Orang. Hanya PSP3 yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah saja yang memahami bahasa Jawa, selebihnya hanya sekedar mengerti sedikit seperti utusan dari Jawa Timur atau bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali seperti utusan dari Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Kendati demikian keinginan yang cukup tinggi daripada peserta PSP3 ini untuk belajar sedikit demi sedikit kendala tersebut bisa diatasi walaupun hanya

oleh beberapa peserta saja. Selebihnya memang hingga akhir tugas hanya mengerti beberapa kosa kata bahasa Jawa saja.

Ketiga, minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah. Program PSP3 dalam pelaksanaannya tidak bisa berdiri sendiri, yang artinya memang selain peran aktif dari masyarakat juga diperlukan dukungan terutama dari pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi. Begitupun dengan PSP3 yang ada di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, kurangnya dukungan program-program dari pemerintah Kabupaten Bantul yang bisa bersinergi dengan program PSP3 yang sebenarnya bisa mempermudah tugas dari pada pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan program-programnya.

Peran pemerintah dalam hal ini instansi terkait untuk lebih berperan dalam mendukung ataupun mendorong para pengusaha kecil terutama pengusaha muda sangatlah penting karena beberapa keuntungan yang dapat diberikan oleh para pengusaha muda ataupun pengusaha kecil yang ada di pedesaan sekalipun dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Usaha-usaha kecil menengah di pedesaan dapat berkontribusi juga dalam menyerap lebih banyak pekerja. Sektor UKM ini dianggap sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan badan usaha milik negara atau swasta lainnya, seperti diketahui bahwa kebanyakan perusahaan kelas atas akan memerlukan tenaga profesional terampil dengan pendidikan tinggi, meninggalkan yang tidak memiliki pendidikan tinggi tanpa pekerjaan. Beruntunglah dengan adanya UKM maka lapangan kerja terbuka lebih maksimal dan menyerap lebih banyak pekerja bahkan yang memiliki pendidikan paling rendah.

Keempat, faktor pendanaan. Faktor yang menjadi kendala utama dalam keberlangsungan program PSP3. Informasi yang didapatkan terutama yang berasal dari informan peserta PSP3 dan tim asistensi menyatakan bahwa setiap awal tahun selalu terjadi keterlambatan biaya hidup bagi para peserta program PSP3 hingga 3 sampai 4 bulan, sehingga biaya hidup tersebut dirapel di bulan ke empat atau ke lima dengan pembayaran yang hanya 3 bulan terlebih dahulu. Salah satu yang jadi kendala adalah sering terlambatnya pembayaran hak para peserta program PSP3, sehingga menjadikan kurang optimalnya program yang akan dilakukan oleh peserta.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah

Secara umum memang program PSP3 yang ada di Kecamatan Dlingo belum sepenuhnya berhasil dalam mendukung ketahanan ekonomi wilayah, namun di beberapa kelompok masyarakat desa pendampingan program PSP3, dinilai berhasil dan memberikan kontribusi positif terutama dalam peningkatan di bidang perekonomian. Bisa dikatakan program PSP3 baru sebatas berimplikasi pada ketahanan ekonomi keluarga pada kelompok binaannya, beberapa kelompok yang memang merasakan peningkatan setelah dibina oleh peserta PSP3 di antaranya adalah kelompok budidaya jamur, kelompok usaha makanan Desa Mangunan, dan pengembangan potensi pariwisata Desa Mangunan.

Sedangkan kelompok usaha pendampingan yang gagal atau tidak berkembang yaitu kelompok pembesaran lele Desa Terong, kelompok ternak ayam kampung Desa Terong, Desa Jatimulyo dan Desa Mangunan, kelompok kerajinan Bambu Desa Jatimulyo. Kelompok-kelompok

tersebut mengalami kegagalan dikarenakan berbagai faktor dan faktor yang utama adalah minimnya pengetahuan tentang sektor yang akan dikembangkan, sehingga diharapkan dari segi perekrutan dan pelatihan sebelum penerjunan bisa lebih ditingkatkan lagi. Program PSP3 yang dilaksanakan di Kecamatan Dlingo dirasakan masih banyak kekurangan sesuai dengan yang peneliti rasakan dan juga menurut informasi-informasi yang peneliti dapatkan dari informan. Terutama dari segi rekrutmen yang memang dirasakan belum dapat menyaring atau menyeleksi peserta-peserta yang berkompeten dan unggul, karena memang beberapa individu peserta PSP3 yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Dlingo belum sesuai dengan harapan. Adanya beberapa peserta yang meninggalkan lokasi penugasan sebelum kontrak berakhir dan juga banyaknya program-program kerja yang tidak berjalan sesuai harapan memperlihatkan bahwa para peserta PSP3 seperti belum siap untuk diterjunkan ke lapangan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dari segi pelatihan atau *training* yang memang seharusnya bisa dilakukan lebih intensif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, sehingga peserta program PSP3 dapat lebih maksimal dalam menyusun program kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Peranan pemerintah daerah juga merupakan hal yang mutlak harus ditingkatkan kembali dalam partisipasinya untuk mensukseskan program PSP3 ini.

Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan rekomendasi yang tepat mengenai lokasi-lokasi yang memang sangat membutuhkan tenaga dari peserta PSP3, pemerintah daerah juga dapat melakukan survey atau penelitian pendahuluan sebelum peserta PSP3 diterjunkan ke lapangan, lalu

memberikan rekomendasi kepada pengelola program, sehingga pengelola program dapat memberikan informasi-informasi awal kepada para peserta PSP3 agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah penempatannya, seperti program kerja ataupun ide-ide dan inovasi untuk mengembangkan daerah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang evaluasi program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan di wilayah Kecamatan Dlingo dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan program direalisasikan dengan tepat yaitu menyentuh berbagai macam komponen kegiatan di masyarakat yaitu perekonomian, pendidikan dan sosial. Kegiatan program bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan tingkat keberhasilan program yang belum terlalu memuaskan karena hanya beberapa kelompok usaha yang berhasil dirintis ataupun berhasil dikembangkan.

Kedua, pelaksanaan program PSP3 di wilayah Kecamatan Dlingo menghadapi berbagai kendala seperti kondisi geografis yang berbukit-bukit dan sebagian wilayah memang sulit untuk dijangkau, keterbatasan akses/ sarana transportasi yang ada, faktor bahasa dan budaya karena peserta sebagian besar berasal dari luar wilayah suku Jawa, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat, unsur pendanaan dari pengelola program.

Ketiga, program PSP3 di wilayah Kecamatan Dlingo belum dapat meningkatkan ketahanan ekonomi di wilayah tersebut, karena baru sebagian kecil kelompok yang

memang bisa dirintis atau berkembang dan itupun masih dalam skala kecil.

DAFTAR PUSTAKA

D'Abreo, Desmond A. 1993. "Pelatihan Evaluasi Partisipatoris", dalam Fernandes, Walter dan Rajesh Tandon (eds), *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta: Pustaka Cakra..

Sunardi, R.M. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa: Teori Ketahanan Nasional, Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Regional*. Jakarta: PT Kuaternita Adidarma

Suryo, 2013 *Kemenpora Menggerakkan Pemuda Lewat Program PSP3 Advertorial – detik News edisi Rabu, 04/ 09/2013 14:22 WIB online diakses 20 15 Desember 2013.*

Undang-Undang:

UU Kepemudaan No 40. Tahun 2009, Pdf. Online diakses 25 Mei 2013, pukul 21.30 WIB. <https://www.google.com/url?Sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c d=1 &>

Internet:

<http://news.detik.com/read/2013/09/04/142223/2349128/794/kemenpora-menggerakkan-pemuda-lewat-proygram-ps-O?nd772204btr> .
<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/11/07/mvkvuh-progrowth-tapibelum-propoor-dan-projob>. Progrowth Tapi Belum Propoor dan Projob. Online diakses 22 Febuari 2014.